

**PERAN *ELECTRONIC GOVERNMENT* DAN RELASI MEDIA MASSA LOKAL
DALAM MEWUJUDKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI
PROVINSI NTB**

**(Studi Kasus Pada Bagian Kesekretariatan dan Pusat Data Elektronik, Sekertariat
Daerah Provinsi NTB dengan Media Massa: Lombok Post dan *Lombokita.com*)**

Khoirul Hidayat (105120600111014)

LATAR BELAKANG

Berjalannya proses keterbukaan informasi publik, yang diselenggarakan oleh pemerintah tentunya memiliki peranan penting terhadap keterlibatan media massa yang turut membantu pemerintah dalam mewujudkannya. Terselenggaranya akses informasi dan publikasi dari pemerintah kepada masyarakat sangat dibutuhkan, terkait proses demokrasi yang menjadi hal utama dalam menelaah pemerintahan yang baik atau *good governance*.

Kegiatan penyebaran informasi, publikasi, maupun sosialisasi dari kegiatan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah kepada masyarakatnya memang masih memiliki beberapa kendala. Permasalahan mengenai proses komunikasi antar pemerintah dengan masyarakat, seperti minimnya akses informasi kepada publik, menjadikan pemerintah dan media massa menjalin relasi/kerjasama yang nantinya akan menjadi penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Hal senada didukung oleh pernyataan Tamburaka & Rianto (2012) sebagai berikut:

“Harus diakui jika media massa memiliki kekuatan besar mempengaruhi opini publik. Melalui fungsi agenda setting, media massa mampu mengubah peristiwa biasa menjadi luar biasa penting bagi publik, dan memainkan berbagai peranan dalam masyarakat. Faktanya, memang banyak kejadian penting di berbagai penjuru dunia digerakkan oleh media massa”.¹

*“Reformasi pemerintahan sebagaimana terjadi di Indonesia pada akhir tahun 90-an yang lalu, menunjukkan bahwa tuntutan aktualisasi penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat menjadi tidak dikesampingkan lagi untuk menjadi perhatian utama”*.²

Proses penyebaran informasi kepada masyarakat mengenai transparansi kegiatan, maupun berbagai kebijakan daerah tercantum dalam UU No.14 Tahun 2008 mengenai keterbukaan informasi publik. Menimbang bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap

¹ Apriadi Tamburaka, *Agenda Setting Media Massa*, Jakarta: Rajawali Press, 2012, Hlm.7

² Budi Rianto, *Aplikasi E-government Dalam Pelayanan Publik*, Surabaya: PMN, 2012, Hlm.32

orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya, menyangkut hak asasi manusia dalam memperoleh informasi, serta mewujudkan ciri penting di dalam aspek negara yang demokratis.³

Di satu sisi, koordinasi antar pemerintah daerah dengan media massa lokal tersebut berjalan dengan baik dan disisi lain, kegiatan koordinasi tersebut bisa jadi terhambat karena kesalahan teknis maupun pemberitaan media massa yang berlebihan, serta banyaknya faktor-faktor lain yang menyebabkan terjadinya hal tersebut. Praktik *good governance* juga mengisyaratkan adanya transparansi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan. *Governance* dinilai baik atau buruk, antara lain ditentukan oleh unsur transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.

Rendahnya kualitas pelayanan publik pada era reformasi di Pemerintah Daerah, merupakan sorotan yang diarahkan kepada birokrasi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal serupa, terjadi pada Provinsi NTB, yang dalam implementasi keterbukaan informasi publik, masih menuai kejanggalan, baik dalam distribusi informasi, penyelenggaraan akses publikasi, hingga informasi yang terkadang masih ditutupi. Permasalahan ini menjadi hal yang menarik untuk dibahas, karena Pemerintah Provinsi NTB tergolong baru melaksanakan akses keterbukaan informasi publik kepada masyarakatnya.

Meminjam pendapat Rogers, era reformasi saat ini dapat dikategorikan sebagai era komunikasi interaktif (*interactive communication*)⁴. komunikasi interaktif memiliki pengertian bahwa media massa memiliki peranan yang sangat besar dalam kehidupan, transfer pengetahuan (*transfer of knowledge*), transfer informasi, bahkan komunikasi dapat dilakukan media massa. Program yang diselenggarakan untuk menunjang keterbukaan informasi publik mengacu pada 3 (tiga) program *e-government* serta koordinasi dengan beberapa media massa. Program *e-government* yang disajikan adalah *Sms Center*, Website Provinsi NTB, *E-Procurement*. Dengan media massa lokal Lombok Post (Media Cetak) dan *Lombokita.com* (Media Online).

³ UU No.14 Tahun 2008 mengenai keterbukaan informasi publik

⁴ Anandya Abrar, *Teknologi Komunikasi Perspektif Ilmu Komunikasi*, Yogyakarta: Lesfi, 2003, Hlm.17

Dari ke 4 (empat) pemamparan program keterbukaan informasi publik di atas, dapat disimpulkan bagaimana berjalannya aspek transparansi informasi, publikasi, serta komunikasi yang terjalin antara masyarakat dengan Pemerintah Provinsi NTB, sesuai dengan UU No.14 Tahun 2008. Penelitian ini juga diharapkan mampu membantu beberapa kekurangan terhadap permasalahan ketidakpuasan, ataupun persepsi masyarakat NTB terhadap pemerintah terhadap pelayanan publik yang kurang maksimal serta mengacu kepada faktor *clean government* yang diharapkan.

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab 2 (dua) ini, akan dijelaskan beberapa poin-poin penting terkait pemaparan aspek penunjang dalam membandingkan penelitian yang dilakukan, dengan penelitian terdahulu. Ada 5 (lima) sub bab yang akan dijelaskan, yaitu keterbukaan informasi publik, konsep *Networking Governance*, *Reinventing Government* sebagai *grand teori*, lalu penelitian terdahulu sebagai pembanding, serta kerangka pikir penelitian

Definisi Keterbukaan Informasi Publik

Kegiatan penyelenggaraan asas transparansi informasi, mengenai publikasi, baik kebijakan yang diambil oleh pemerintah, berita-berita, hingga informasi dari pihak Pemerintah kepada masyarakatnya sudah tercantum sesuai dengan UU No.14 Tahun 2008 mengenai implementasi keterbukaan informasi publik di Indonesia yang berbunyi sebagai berikut:⁵

- a. Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik.
- b. Setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.
- c. Informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Keterbukaan informasi publik dimaksudkan untuk membahas sejauh mana pemerintah melaksanakan dan mengimplementasikan undang-undang di atas dapat terlaksana dengan baik, sesuai dengan hak-hak masyarakat dalam memperoleh informasi.

⁵ Pasal 2 Bab II Bagian Pertama UU No.14 Tahun 2008 mengenai keterbukaan informasi publik

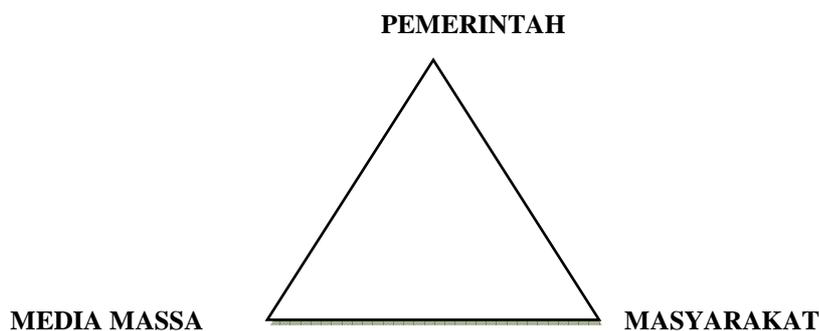
Konsep *Networking Governance* (Wayne R. Leach)

Networking governance dimaksudkan sebagai akses dari pemerintah daerah dan kerjasama yang terjalin antar pemerintah daerah dengan berbagai pihak non pemerintah untuk menyebarluaskan serta melancarkan beberapa kebijakan, baik informasi, publikasi, maupun mengkomunikasikan kegiatannya kepada masyarakat. Sedangkan yang dimaksud pihak *non* pemerintah dalam penelitian ini merupakan media massa lokal dan pihak swasta.

Media massa lokal dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah, untuk melancarkan implementasi program, melalui koordinasi yang terjalin dan nantinya akan dikonsumsi masyarakat, melalui gaya penulisan dan bahasa dari media massa tersebut. *Networking governance* termasuk dalam kriteria *good governance* dan diharapkan mampu mengkaji permasalahan mengenai jalinan relasi antara pemerintah dengan pihak media massa lokal.

Kepercayaan dari masyarakat menjadi sangat penting untuk memahami persoalan transparansi dan akuntabilitas interaksi *networking*/jaringan aktor dalam *governance*. Dalam konsep *networking governance*, *trust* (kepercayaan) menjadi kunci dan *network* sebagai kata kunci *governance*. Prinsip dari unsur pembentuk transparansi, keterbukaan dan akuntabilitas aktor *governance* sangat terkait dengan kepercayaan yang diberikan masyarakat, yang menjadi tujuan dari terlaksananya konsep tersebut.⁶

Aktor-Aktor Pembentuk *Networking Governance*⁷



Sumber: Wayne R. Leach (2001)

⁶ Hetifah J. Sumarto, *Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009, Hlm.15

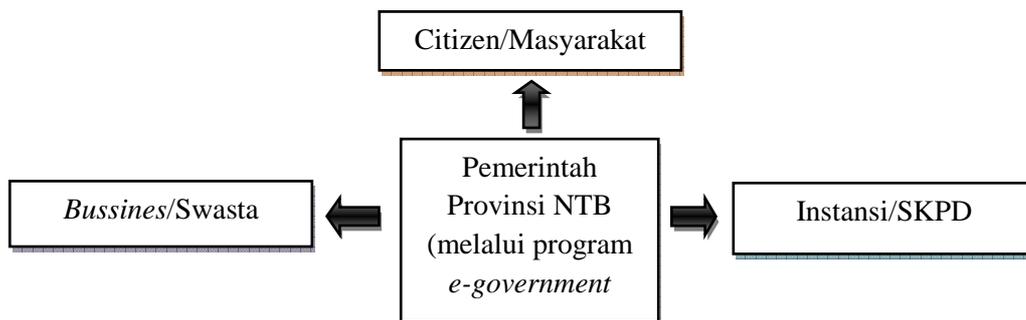
⁷ Dedy Hermawan, *Trust and Network Governance: Transparan dan Akuntabel*, Malang: Administrasi Negara, 2008, hlm.2

Teori *Reinventing Government* (David Osborne)

Dalam tujuannya memperbaiki kualitas pelayanan publik, meningkatkan efisiensi, transparansi, serta banyak manfaat positif lainnya maka *e-government* di definisikan sebagai sesuatu yang perlu untuk dilakukan oleh organisasi pemerintahan. ICT (*Information and Communication Technologi*) adalah sistem atau teknologi yang dapat mereduksi batasan ruang dan waktu untuk mengambil, memindahkan, menganalisis, menyajikan, dan menyampaikan informasi data menjadi sebuah informasi, sesuai dengan unsur *e-government*.

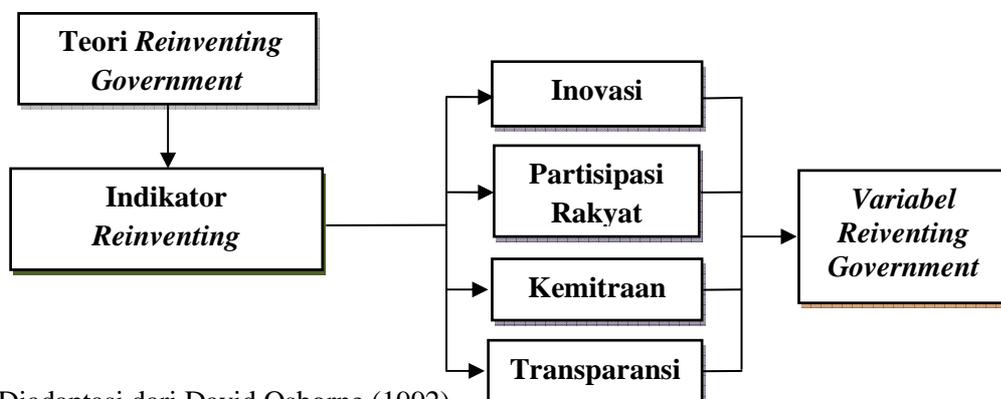
Menurut David Osborne (1992), *reinventing government* merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan efektifitas, efisiensi, akuntabilitas pemerintah dengan transformasi teknologi informasi, komunikasi dan pelayanan kepada masyarakat (*public service*) melalui internet. Klasifikasi pelayanan lebih difokuskan kepada pasar, persaingan serta program pilihan pelanggan yang memungkinkan pelanggan bisa memilih produk atau jasa yang diinginkan.⁸

Relasi *E-Government* dalam Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik



Sumber: David Osborne (1992)

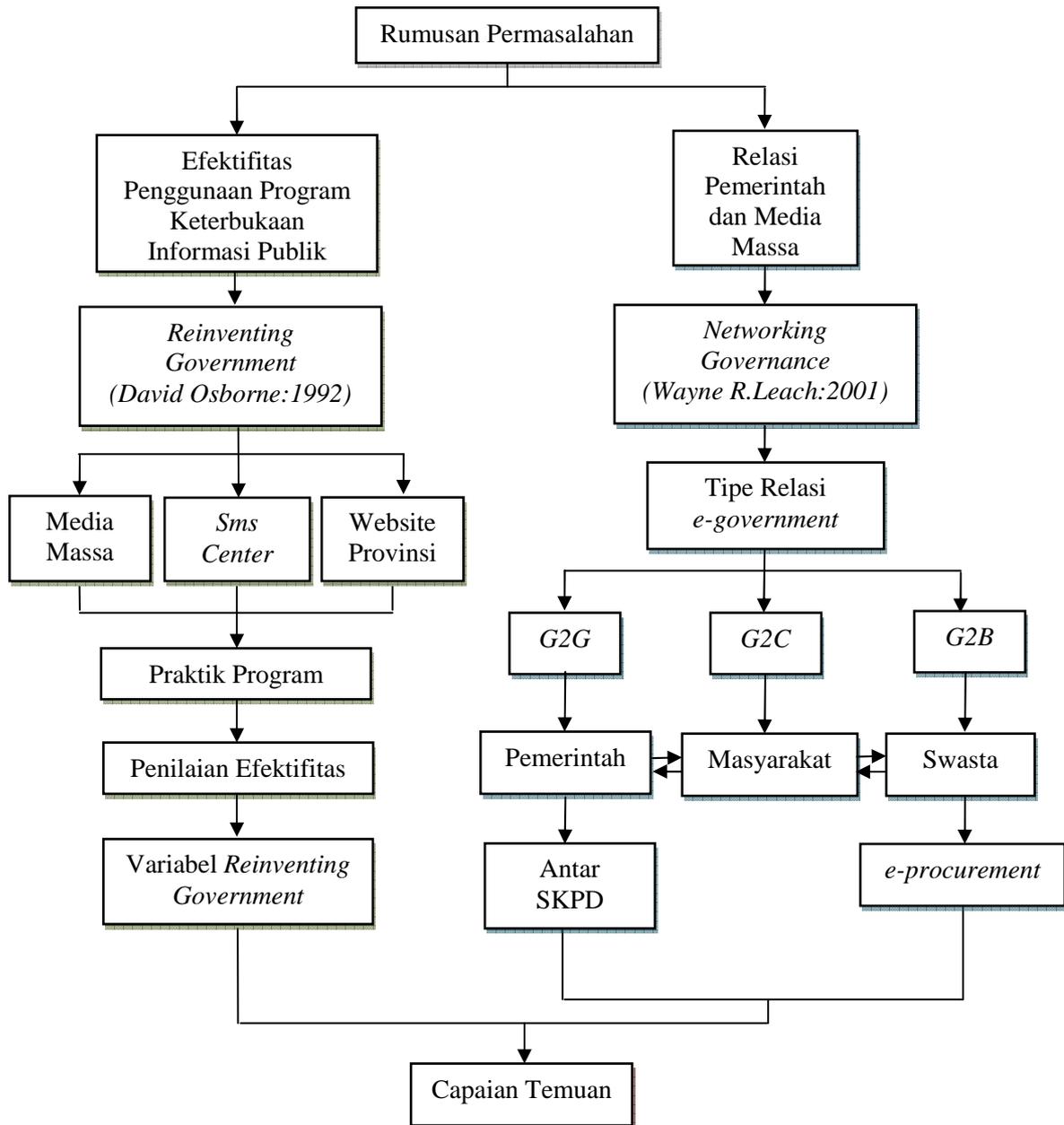
Pembagian Variabel *Reinventing Government*



Sumber: Diadaptasi dari David Osborne (1992)

⁸ Asep Arifin, *Pengaruh Reinventing Local Government dan E-government Terhadap Good Governance*, Bandung: Unpad, 2011. Hlm.6

Kerangka Pikir Penelitian⁹

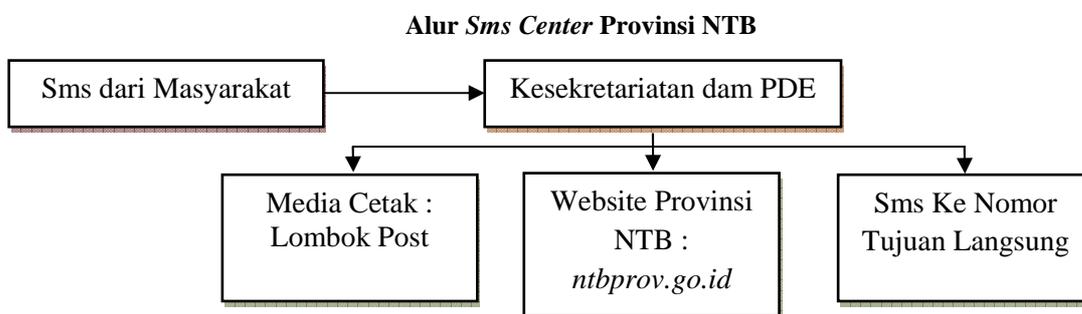


Sumber: Data Primer di Olah (2014)

⁹ Kerangka Pikir Penelitian menjelaskan hubungan antara kedua rumusan masalah dari penelitian, yaitu efektifitas yang dibaca dengan menggunakan teori *reinventing government* dan relasi pemerintah dengan media massa lokal dengan menggunakan konsep *networking governance*, yang nantinya akan menghasilkan temuan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah yang ada.

a. Sms Center Provinsi NTB

Program pertama dalam pemamparan *e-government* pada penelitian ini adalah *sms center*. Pada dasarnya, *sms center* merupakan program berbasis komunikasi 2 (dua) arah, dengan menggunakan perantara telepon seluler yang berbasis *short messages* (pesan pendek)¹⁰ yang dikemukakan masyarakat kepada Gubernur, beberapa SKPD, dalam bentuk undangan.¹¹ *Sms center* yang digagas oleh Gubernur NTB, secara resmi diluncurkan pada Bulan Desember Tahun 2008, dan menjadi program *e-government* pertama yang digagas dalam jabatan periode pertama Gubernur NTB, bekerjasama dengan Bagian Kesekretariatan dan PDE Setda NTB.



Sumber: Data Primer di Olah (2014)

b. Website Provinsi NTB

Program *e-government* kedua adalah website Provinsi NTB, yang dapat diakses melalui media internet. Website *ntbprov.go.id* ini secara resmi diluncurkan sesuai dengan SK Gubernur NTB No. 62 Tahun 2009 mengenai penerapan *e-government* Provinsi NTB.¹² Secara garis besar, website yang dikelola langsung oleh Bagian Kesekretariatan dan PDE yang bekerjasama dengan Sub Bagian Pemberitaan dan Komunikasi Setda Provinsi NTB sebagai pembuat berita website ini yaitu memberikan informasi kepada masyarakat pengguna internet, untuk dapat mengetahui berita berita terbaru, maupun acara, ataupun permasalahan yang sedang dihadapi oleh SKPD di Provinsi NTB.

¹⁰ Program *sms center* ini menggunakan *server sms gateway* dan aplikasi *PHP (Hypertext Preprocessor)*

¹¹ *Sms center* antar SKPD dimaksudkan sebagai cara dari pemerintah Provinsi NTB untuk menyebarkan undangan antar SKPD lain dalam lingkup Provinsi NTB, seperti undangan rapat, pertemuan dengan Gubernur, Sekda, hingga undangan peringatan hari besar, libur nasional, upacara, dsb.

¹² Website Pemerintah Provinsi NTB merupakan website pertama yang dicetuskan oleh Sekretariat Daerah Provinsi NTB dan dibawah pengawasan PPID Dishubkominfo Provinsi NTB, yang merupakan program inovasi dari Bagian Kesekretariatan dan PDE, dimana berita-berita dan informasi dapat diakses dengan mudah melalui *gadget*, dan informasi/berita di-*update* setiap hari.

Website Provinsi NTB

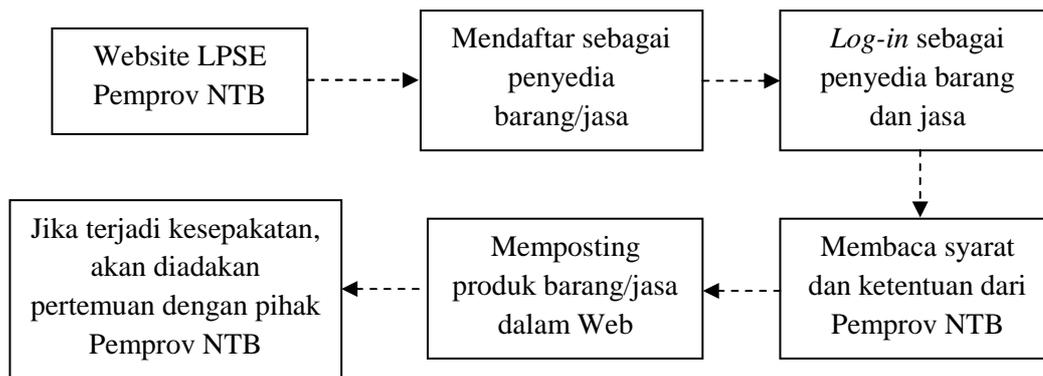


Sumber: ntbprov.go.id (2014)

c. E-Procurement Provinsi NTB

Selain *sms center* dan website Provinsi NTB, program *e-government* yang menjadikan relasi antara pihak swasta dan pemerintah dapat terjalin adalah program *e-procurement*. Program *e-procurement* merupakan sistem pengadaan produk barang dan jasa dengan menggunakan media elektronik (*online*), dengan tujuan lebih efisien serta efektif, ataupun mengurangi penggunaan tenaga kerjadalam prosesnya.¹³

Bagan 4.2 Proses E-Procurement Pemerintah Provinsi NTB



Sumber: Data di Olah (2014)

¹³ Dikutip dari laman web: <http://lkpp.co.id/> pada Tanggal 09/05/2014 Pukul 22.46 WIB

Website LPSE E-Procurement Pemerintah Provinsi NTB

No	Kategori	Nama Lelang	Agency	Provinsi	Tahap	HPS
1	Jasa A Penguni Jasa Lainnya		ULP NTB	Provinsi	Pengumuman Download Kualifikasi Dokumen	74,95 jt
2	PENGADAAN FORMULIR DAN SAMPUL PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 2014		Komisi Umum NTB	Pemilihan Prov.	Pengumuman Pascakualifikasi Pemberian Penjelasan Download Dokumen	1,18 M
3	Pembangunan Konstruksi Jalan Boulevard RSUP NTB		ULP NTB	Provinsi	Pengumuman Pascakualifikasi Download Dokumen	1,61 M
4	PENGAWASAN RENOVASI DAN PERLUASAN BANGUNAN RSJ PROVINSI NTB		ULP NTB	Provinsi	Pengumuman Download Kualifikasi Dokumen	174,99 jt
5	Paket IX Pembangunan Sumur Bor Eksplorasi Menjadi Produksi di Kabupaten Lombok Tengah		ULP NTB	Provinsi	Download Pengadaan Dokumen	325,23 jt

Sumber: lpse.ntbprov.go.id

d. *Lombokita.com*

Lombokita.com merupakan media massa lokal pertama di Provinsi NTB yang kemunculannya berupa media *online* (dengan menggunakan media internet) secara utuh, dan menyebarkan berita-berita mengenai Provinsi NTB dengan akses yang sudah terbilang cukup mudah untuk saat ini. *Lombokita.com* didirikan terhitung dari Tanggal 18 November 2013, bekerjasama dengan pihak Pemprov NTB juga tentunya memiliki akses untuk mempermudah masyarakat yang mengunjungi laman website tersebut ke laman website Provinsi NTB yaitu dengan disediakannya *space* untuk membuka langsung website Provinsi NTB.

Website *Lombokita.com*

The screenshot shows the homepage of Lombokita.com. At the top, there is a navigation menu with categories like DEPAN, KABAR LOMBOK, EKONOMI BISNIS, SAINTEK, PERISTIWA, WISATA & KULINER, CAYA HIDUP, BOLA, and BLOG WARGA. Below the menu is a search bar and a main content area with several news articles. One article is titled 'Warga Tolak Pembangunan PLTD Tanjung Karang' with a photo of a group of people. Another article is 'Penerimaan DBHCHT di Bank untuk Hindari Pemotongan'. There are also advertisements for mobile phones and services. On the right side, there is a sidebar with a Facebook share button and a 'BLOG WARGA' section.

Sumber: *Lombokita.com* (2014)

e. Lombok Post

Koran Lombok Post Edisi 22 Februari 2014



Keberadaan Lombok Post dibawah naungan Jawa Post Group, menjadikan media cetak ini sebagai mitra dari pemerintah Provinsi NTB secara langsung. Dapat dicontohkan dalam menyalurkan kegiatan *e-government sms center* Pemerintah Provinsi NTB, Lombok Post didaulat sebagai media yang menyalurkan jawaban langsung dari Gubernur NTB kepada pengguna *sms center* yang diposting langsung setiap hari senin di Koran Lombok Post, dalam bentuk Gubernur NTB Menjawab.

Bentuk Relasi dan Proses Kerjasama Pemerintah dan Media Massa Lokal dalam Proses Publikasi dan Informasi

Media Massa	Bentuk Relasi	Intensitas Kunjungan ke Bag.Humas dan Protokol Setda NTB melalui Forum Wartawan Pemprov NTB
Lombok Post	<ul style="list-style-type: none"> Sebagai mitra dalam meneruskan informasi dari Bagian Humas dan Protokol Pemerintah Provinsi NTB melalui media cetak, dan kepemilikan sebagian saham dari pihak Pemerintah Provinsi NTB kepada Lombok Post. 	Memiliki satu orang pers untuk <i>stand-by</i> setiap hari dan melihat isu yang terdapat
Lombokita.com	<ul style="list-style-type: none"> Sebagai mitra dan pers yang aktif dalam menjembatani beberapa peliputan informasi serta kegiatan dari Pemerintah Provinsi NTB melalui media <i>online</i> serta saham dari media ini murni dimiliki oleh Gubernur NTB. 	Memiliki satu orang pers untuk wajib <i>stand-by</i> setiap harinya

Sumber : Wawancara dengan Informan (2014)

Proses Kerjasama

- a. *Lombok Post: Pertama*, Proses kerjasama berbentuk disediakannya *space/kolom* untuk program *sms center* Gubernur NTB disebelah pojok kanan atas dari media cetak tersebut.¹⁴ *Kedua*, dengan terbentuknya FWP, beberapa wartawan saling bertukar

¹⁴ Muhtar Haboddin, *Gubernur NTB Menjawab*, Jogjakarta: IGI, 2012, Hlm.5

informasi/data mengenai beberapa berita terkait, misalnya: meminta foto acara terkait kepada Sub Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan. *Ketiga*, beberapa media cetak terkait (termasuk Lombok Post) memberikan langganan koran kepada Pemerintah Provinsi NTB, melalui Sub Bagian Pemberitaan dan Komunikasi.

- b. *Lombokita.com: Pertama*, proses kerjasama tersebut berbentuk disediakananya *space/kolom* untuk sub domain website resmi Provinsi NTB dalam website *Lombokita.com* tersebut disebelah kanan. Hal ini dimaksudkan agar mempermudah para pengunjung website *Lombokita.com* untuk senantiasa mengunjungi website Provinsi NTB.¹⁵ *Kedua*, terkait dengan media cetak *Bulletin NTB BerSaing* yang setiap bulannya diterbitkan oleh Bagian Humas dan Protokol melalui Sub Bagian Pemberitaan dan Komunikasi, *Lombokita.com* menjadi partner sebagai media massa yang menerbitkan dan mencetak bulletin tersebut setiap bulannya.¹⁶

Capaian Tipe Relasi Pemerintah, Media Massa Lokal dan Masyarakat

- **G2B (*Government to Bussines*)**

Government to bussines dalam penelitian ini dimaksudkan sebagai Pemerintah Provinsi NTB menggunakan praktik *e-government* untuk bekerjasama dan menjalin relasi dengan unsur bisnis atau melakukan penempatan saham. Namun artian bisnis tersebut merupakan kepada para pemegang saham, maupun perusahaan, juga pada relasi pihak swasta mewujudkan program kerja dari pemerintah. Hal tersebut dibuktikan dengan:

- a. Adanya saham yang dimiliki oleh Sekretariat Daerah Provinsi NTB melalui Kepala Biro Ekonomi dan Asisten II Sekertaris Daerah Setda Provinsi NTB, kepada PT. Suara Nusa Media Pratama/media cetak (Lombok Post).¹⁷
- b. Program *e-procurement* yang disajikan oleh Bagian Kesekretariatan PDE dapat membantu pihak swasta untuk bekerjasama dalam mengembangkan proses pembangunan seperti Infrastruktur baik produk barang maupun jasa melalui website LPSE.
- c. Terkait media *online Lombokita.com* yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Gubernur NTB sendiri, menjadikan media ini sebagai *patner/mitra* bisnis antara media dengan Pemerintah Provinsi NTB.

- **G2C (*Government to Citizen*)**

Government to citizen dimaksudkan sebagai jalinan relasi antara pihak Pemerintah Provinsi NTB dengan masyarakat, melalui program *e-government* yang diciptakan Pemerintah Provinsi NTB dalam mempengaruhi beberapa kebijakan dan proses komunikasi antar kedua belah pihak. Tipe relasi ini juga memiliki penjelasan alasan sebagai berikut:

¹⁵ Lihat <http://lombokita.com/>

¹⁶ Wawancara dengan Agung (Bagian Manajemen *Lombokita.com*) pada Tanggal 24/01/2014 Pukul 14.00 WITA

¹⁷ Wawancara dengan Alfian Yusni (Pimpinan Redaksi Lombok Post) pada Tanggal 20/02/2014 Pukul.15.00 WITA

- a. Sesuai dengan Pergub NTB No.20 Tahun 2008, terselenggaranya program *e-government* (*sms center* dan *website*) pada akhir Tahun 2008 lalu, yang dimaksudkan sebagai perantara antara pemerintah untuk menjalin komunikasi dan pendistribusian informasi kepada masyarakat.¹⁸
- b. Beberapa aspek kelembagaan yang terkandung dalam *G2C* ini, menjadikan beberapa Dinas seperti: PPID dan Inspektorat Provinsi NTB menjadi lembaga pengawas dari berjalannya program *e-government* dari Setda Provinsi NTB terkait beberapa penyelewengan informasi baik (*sms center* dan *website*) untuk dilaporkan kepada Dinas tersebut.
- c. Terkait dengan konsep *networking governance* dari Wayne R. Leach dalam penelitian ini yang mengacu kepada 3 (tiga) aspek: Pemerintah, media massa, dan masyarakat, peneliti menggunakan unsur *Top-Down* dan *Bottom-Up* sebagai relasi pemerintah kepada masyarakat dan masyarakat kepada pemerintah.

- **G2G (*Government to Government*)**

Government to government dimaksudkan untuk menelaah relasi antar pemerintah di Provinsi NTB melalui program *e-government*. *G2G* juga dimaksudkan agar memperlancar hubungan antar pemerintah daerah maupun kepada pemerintah pusat. Analisis relasi *G2G* pada penelitian ini antara lain, sebagai berikut:

- a. *Sms center* dibentuk bukan hanya untuk menerima sms masuk dari para masyarakat kepada pemerintah, melainkan fungsi *sms center* lainnya adalah menyebarkan undangan kepada Dinas/SKPD lainnya di Provinsi NTB mengenai acara, hingga undangan rapat dari Gubernur.
- b. Hubungan yang terjalin antara Bagian Humas dan Protokol Setda Provinsi NTB dengan PPID Dishubkominfo NTB mengenai pengimplementasian publikasi akses informasi, dan pengawasan menjadikan relasi antar Dinas dapat terjalin dan terkoordinasi secara baik.
- c. Proses *sms center* sejatinya tidak hanya melibatkan pihak Humas dan Protokol serta Kesekretariatan dan PDE saja, melainkan proses tersebut bisa disebarluaskan */forward* menurut isi dari sms yang masuk kepada Dinas/SKPD yang bersangkutan. Hal tersebut menjadikan relasi yang terjalin serta aspek komunikasi antar pemerintahan di Provinsi NTB dapat berjalan.

Membaca Keterbukaan Informasi Publik dalam Relevansinya Terhadap Beberapa Aspek Pendukung

Dalam membahas mengenai keterbukaan informasi publik, proses informasi, komunikasi, maupun akuntabilitas yang selalu dihadapkan kepada pemerintah tidak semata hanya membahas hal-hal tersebut. Proses hukum yang mencantumkan UU No.14 Tahun 2008 di dalam hal ini tentunya tidak boleh dikesampingkan dan dijadikan pegangan semata. Urgensi

¹⁸ SOP Data dan Arsip Sub Bagian Pemberitaan dan Komunikasi Setda Provinsi NTB

dari perkembangan undang undang tersebut sangat diharapkan oleh pemerintah untuk meraih kesuksesan yakni terwujudnya *good governance* dan *clean government*.¹⁹

a. Aspek Kelembagaan

Aspek kelembagaan menjelaskan kaitan antara instalasi dari perangkat-perangkat kelembagaan yang membantu menopang keberhasilan implementasi keterbukaan informasi publik. Kelembagaan yang dimaksud juga beberapa SKPD yang memiliki kepentingan untuk mengurus kegiatan keterbukaan informasi publik tersebut. Lembaga yang dimaksud dalam hal ini merupakan:

1. PPID (Pejabat Pengelola Informasi Daerah)
2. Bagian Kesekretariatan dan PDE Sekretariat Daerah Provinsi NTB
3. Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi NTB
4. Sub Bagian Santel dan LPSE Sekretariat Daerah Provinsi NTB
5. Inspektorat Provinsi NTB
6. Komisi Informasi Provinsi NTB
7. Serta beberapa SKPD lain yang terlibat dalam proses tersebut.

b. Aspek Substantif

Kedua aspek dalam menjelaskan penelitian ini, mengarahkan keterbukaan informasi publik kepada beberapa relevansi dari implemementasi kegiatan yang ada di Provinsi NTB dengan faktor yang membantu meneliti terselenggaranya keterbukaan informasi publik di Provinsi NTB. Adapun beberapa alasan dalam penggunaan program tersebut diharuskan mengukur keefektifan program untuk memancing masyarakat dalam merespon informasi sebagai berikut:²⁰

1. Sebagai fungsi kontrol dan pengawasan dari masyarakat terhadap program *e-government* yang diselenggarakan Setda Provinsi NTB terkait kekurangan serta penyempurnaan akses informasi kepada masyarakat.
2. Menjembatani *Democratic Government* dalam menyikapi proses demokratisasi dari aspirasi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.
3. Terkait *Open Government*, atau pemerintahan yang terbuka dan transparansi publik, program pemerintah dituntut untuk menjadi akses yang baik, dalam menyelenggarakan dan menyebarkan informasi kepada masyarakat.

¹⁹ *Clean government* dimaksudkan sebagai perwujudan sistematis antara *good governance* atau yang kerap disebut pemerintahan yang baik dengan pemerintahan yang bersih. Pemerintahan yang bersih dalam hal ini adalah berdasarkan beberapa unsur dari keterbukaan informasi publik seperti *openness*, *transparency*, dan *accountability* serta akses demokrasi yang terselenggara.

²⁰ Khotibul Islam, *Informasi Publik: Anda Berhak Tau*, Mataram: LSBH NTB, 2010. Hlm.7

4. Menyelaraskan UU keterbukaan informasi publik dengan mandat dari konsitusi UUD 1945, Pasal 28 F yang diharapkan untuk mampu membuka tabir gelap informasi publik yang selama ini ditutupi oleh pemerintah.
5. Memperjelas dan memudahkan akses informasi kepada masyarakat dengan cepat, mudah, sederhana, serta mudah dijangkau oleh semua kalangan masyarakat NTB.
6. Memancing partisipasi masyarakat dan desakan yang kuat terhadap percepatan proses pembangunan daerah (terutama Provinsi NTB) ke dalam aspek yang mengalami kekurangan, seperti: Perekonomian, Pertanian, dsb.

Program Media Massa Lokal dalam Proses Publikasi Informasi

Program-program dari beberapa media massa di atas merupakan program yang diunggulkan untuk mengimplementasikan kegiatan keterbukaan informasi publik di Provinsi NTB dan tentunya sesuai dengan gaya, serta kualitas dari karakteristik media massa tersebut. Beberapa proses dari media massa lokal dengan program *e-government* mengenai relasi antar kedua belah pihak dalam unsur *networking governance*, dalam unsur pembentuk keterbukaan informasi publik yaitu *opennes*, *accountability* dan *transparency* sebagai berikut:

Program Relasi *E-Government* dan Media Massa Lokal dalam Unsur Pendukung Konsep

Networking Governance

Unsur	Program <i>E-Government</i>	Media Massa Lokal
<i>Opennes</i> (Keterbukaan)	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Sms center</i> diciptakan bertujuan untuk memfasilitasi komunikasi antar pemerintah dengan masyarakat. Tentunya jawaban/ balasan dari program ini kepada pengguna dapat di <i>share</i> langsung kepada masyarakat lainnya, dengan 3 (tiga) cara: balasan langsung, website, dan Lombok Post yang mengarah pada unsur <i>opennes</i>. • Melalui informasi jadwal kegiatan gubernur (kepala daerah), kegiatan Setda maupun SKPD di Provinsi NTB, hingga kebijakan yang di tampung dalam berita <i>online</i> website. 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Lombok Post</i> memiliki relasi yang sama dengan <i>sms center</i> yaitu mengekspose jawaban dari SKPD/ Gubernur yang dicantumkan dalam koran yang diterbitkan setiap hari senin. • <i>Lombokita.com</i> mencantumkan sub <i>domain</i> website Provinsi NTB di dalam <i>link</i> tersebut guna membantu masyarakat untuk lebih dekat dengan pemerintah dengan mempermudah dengan satu kali <i>klik</i>.
<i>Transparency</i> (Transparansi)	<ul style="list-style-type: none"> • Dengan <i>sms center</i>, masyarakat bisa langsung menanyakan dan mengkonfirmasi mengenai program kerja yang sedang dilakukan oleh SKPD maupun Gubernur. • Mengenai Program Kerja Pemerintah Provinsi NTB mengenai Pembangunan Masjid <i>IC</i> di NTB, masyarakat menemukan transparansi pemasukan dan pengeluaran keuangan dari pembiayaan pada laman website Provinsi NTB. 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Lombok Post</i> yang menjalin kemitraan dengan Bagian Kesekretariatan dan PDE bekerjasama dengan unsur transparansi mengenai postingan jawaban <i>sms center</i> di media tersebut dan tersedianya <i>space</i> bagi Pemerintah Provinsi NTB untuk mempublikasikan sesuatu. • <i>Lombokita.com</i> mempublikasikan berita terkait transparansi melalui jejaring sosial, yang memudahkan masyarakat mengunjungi web mereka.

Accountability (Tanggung Jawab)	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat bebas untuk meminta konfirmasi dan menanyakan sesuatu serta kritikan mengenai tanggung jawab Gubernur/ Kepala SKPD terkait, jika terjadi penyimpangan/ kekeliruan dalam pelaksanaan pemerintahan melalui <i>sms center</i>. • Unsur <i>accountability</i> yang terdapat pada website adalah fitur layanan publik yang mendasari pertanggung jawaban mengenai informasi dari pelayan publik SKPD Provinsi NTB. 	<ul style="list-style-type: none"> • Karena Pemerintah Provinsi NTB memiliki saham pada <i>Lombok Post</i>, media tersebut dituntut untuk memiliki nilai tanggung jawab terhadap penjembitan publikasi dari Pemerintah Provinsi NTB kepada masyarakat. • Kepemilikan <i>Lombokita.com</i> secara utuh dimiliki oleh Gubernur NTB, tentunya media ini dituntut untuk profesional dalam menjembatani proses publikasi kepada masyarakat.
--	---	--

Sumber: Data Primer di Olah (2014)

Faktor Demokratisasi Dalam Membaca Pencapaian Koordinasi *E-Government* dan Media Massa Lokal

Argumen tersebut juga diperkuat dengan UU No.32 Tahun 2004 mengenai pemerintahan daerah yang berbunyi: “*melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah*”²¹ dimana pernyataan tersebut dalam keterbukaan informasi publik.

Faktor Pendorong Demokrasi dalam Efektifitas Program Keterbukaan Informasi Publik

Program <i>E-Government</i>	Media Massa Lokal
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Sms center</i> membuktikan program tersebut menjadi program yang selalu memiliki “<i>pelanggan</i>” dalam implementasinya mengenai proses demokrasi di Provinsi NTB. Hal tersebut terbukti dengan terus meningkatnya persentase pengguna setiap tahunnya dari masyarakat yang menggunakan program tersebut. • <i>Website Provinsi NTB</i> menyediakan posting komentar (melalui berita <i>online ntbprov.go.id</i>) dan <i>e-mail</i> langsung yang ditujukan kepada SKPD terkait guna menyampaikan komentar, pertanyaan, pendapat yang merupakan perjalanan dari faktor demokrasi di Provinsi NTB. 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Lombokita.com</i> sama seperti halnya Website Provinsi NTB yaitu membaca berita harian <i>online</i>, namun kelebihanannya adalah berita tersebut bisa di <i>share</i> di media sosial, dan memiliki fitur <i>blog warga</i> sebagai pendorong demokrasi. yang berisi berita, informasi, pendapat, saran, maupun kritikan dari masyarakat yang diposting secara gratis. • <i>Lombok Post</i> menjadi satu-satunya media <i>non elektronik</i> (cetak harian) yang dapat dianalisis programnya dengan faktor demokrasi melalui fitur <i>Opini</i> dan <i>Public Serives</i>. Fitur yang dimaksud adalah memposting beberapa opini dari masyarakat, serta bantuan dari <i>Lombok Post</i> untuk menyikapi permasalahan pelayanan publik.

Sumber: Data Primer di Olah (2014)

²¹ Dalam Bab IV Pasal 20 UU No.32 Tahun 2004, mengenai Asas Penyelenggaraan Pemerintahan, dijelaskan pula beberapa asas yang termasuk dalam konsep *good governance* dan unsur pembentuk dari *networking governance* yaitu: Asas Akuntabilitas, dan Asas Keterbukaan. Unsur Demokrasi juga terdapat pada Pasal 22 mengembangkan kehidupan demokrasi; dan menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak;

PENUTUP

Hasil Capaian dalam sub bab ini dimaksudkan, untuk menjelaskan apa saja yang telah dicapai dari beberapa pembahasan bab-bab yang telah dijelaskan diatas, terhitung dari penulisan proposal penelitian, pelaksanaan penelitian, hingga dalam proses penulisan penelitian ini dilaksanakan.

Capaian Relasi Pemerintah dan Media Massa Lokal

Pertama, dari relasi yang terjalin antara Pemerintah Provinsi NTB antar SKPD menjadikan informasi mengenai berita, kebijakan, hingga himbauan/ pengumuman dari pemerintah bisa diawasi.. *Kedua*, yakni berjalannya asas dari *e-government G2B, G2C dan G2G* menandakan berhasilnya relasi yang dijalin pemerintah kepada media, serta pemerintah kepada pemerintah lainnya. *Ketiga*, dengan terbentuknya forum wartawan pemprov mempermudah akses dari pers media massa, untuk memperoleh informasi langsung dari pihak Pemprov NTB.

Capaian Efektifitas Program Keterbukaan Informasi Publik

Pertama, efektifitas dijadikan wadah untuk menilai persepsi masyarakat terhadap perkembangan keterbukaan informasi publik di Provinsi NTB. *Kedua*, efektifitas dijadikan sebagai modal utama dalam mengimplementasikan proses demokrasi dalam keterbukaan informasi publik. *Ketiga*, adalah penilaian efektifitas program ini dijadikan sebagai implementasi dari transparansi, keterbukaan, dan tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat, khususnya dalam menunjang *good governance* di Provinsi NTB.

Rekomendasi Efektifitas Program Keterbukaan Informasi Publik

Pertama, peneliti mengharapkan media massa lokal tersebut sebaiknya melakukan evaluasi hingga pantauan secara *intern* terhadap efektifitas program- yang disajikan dan kepuasan masyarakat.. *Kedua*, sesuai dengan UU No.32 Tahun 2002 mengenai lembaga penyiaran publik, perlu diciptakannya program unggulan yang *real* dan khusus dari Pemerintah Provinsi NTB kepada media lokal, yang secara langsung narasumber didatangkan dari pihak Pemprov NTB. *Ketiga*, berkaca dari media *Lombokita.com* yang mempromosikan dan memiliki jejaring sosial sendiri dalam mengundang masyarakat untuk mengunjungi website mereka.

Rekomendasi Relasi Pemerintah dengan Media Massa Lokal

Pertama, seiring dengan adanya unsur partisipasi rakyat dalam indikator efektifitas di atas, khusus media *Lombokita.com* dan Lombok Post, disarankan untuk membuat program khusus dalam bentuk kolom komentar bagi masyarakat untuk berpendapat, komentar, dalam menganalisis kinerja pemerintah. *Kedua*, dari aspek kelembagaan yang telah terjalin, tentunya diharapkan koordinasi yang terjalin antara beberapa lembaga seperti PPID, Beberapa bagian dari Setda Provinsi NTB, dan media massa lokal, untuk saling mengawasi dan mengantisipasi kelemahan dari proses implementasi program keterbukaan informasi publik. *Ketiga*, yaitu meningkatkan intensitas relasi yang terjalin antara pihak pemerintah dengan media massa lokal, maupun antar media massa lokal lainnya.

Rekomendasi Kepada Masyarakat

Pertama, yakni berinisiatif melakukan tindakan memonitoring atau mengontrol terhadap pengawasan berlakunya UU keterbukaan informasi publik di daerah, sebagai bentuk dari salah satu wujud dari proses partisipasi. *Kedua*, yaitu membangun kesadaran akan kepemilikan hak-hak masyarakat terhadap implementasi UU keterbukaan informasi publik untuk sekiranya mendapatkan informasi, berita, hingga publikasi terhadap kegiatan Pemerintah. *Ketiga*, tanggap terhadap beberapa informasi yang bersifat rahasia, ataupun tidak sesuai dengan *SOP (Standart Operating Procedure)* maupun kejanggalan-kejanggalan dalam proses kepemimpinan pemerintahan. *Keempat*, menjadikan nama *informasi* sebagai nama yang dibutuhkan dalam pengawasan terhadap kinerja pemerintah.

Sumber Referensi:

- Abrar, Ananadya. 2003. *Teknologi Komunikasi Perspektif Ilmu Komunikasi*. Yogyakarta: LESFI.
- Arifin, Anwar. 2010. *Opini Publik*. Jakarta: Gramata Publishing.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: PT.Rineka Cipta.
- Butterick, Keith. 2012. *Pengantar Public Relations: Teori dan Praktik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Darmastuti, Rini. 2012. *Media Relations: Konsep, Strategi, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.

Indrajit, Richardus Eko. 2006. *Electronic Government: Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.

Osborne, David dan Gaebler Ted. 1996. *Mewirusahaakan Birokrasi: Reinventing Government, Mentransformasi Semangat Wirausaha Ke Dalam Sektor Publik dalam Abdul Rosyid (penerjemah)*. Jakarta: Pustaka Binawan Pressindo.

Rianto, Budi. 2012. *Polri dan Aplikasi E-Government Dalam Pelayanan Publik*. Surabaya: PMN.

Rosidi, Abidarini. 2013. *Reinventing Government: Demokrasi dan Reformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.

Sumarto, J Hetifah. 2003. *Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Tamburaka, Apriadi. 2012. *Agenda Setting Media Massa*. Jakarta: Rajawali Press.

Surat Kabar dan Bulletin:

Harian Lombok Post. "Public Services: Sampaikan Keluhan Anda Mengenai Pelayanan Publik di Provinsi NTB, dalam Kolom ini, Kami Siap Membantu Anda!" Sabtu, 22 Februari 2014.

Bulletin NTB *BerSaing* (Beriman dan Berdaya Saing) Pemerintah Provinsi NTB "SMS CENTER, Salurkan Aspirasi Anda Baik Berupa Informasi, Saran, Kritikan Maupun Pertanyaan Atau Pengaduan Melalui: 0811391300" Edisi Maret 2013.

Regulasi dan Perundang-Undangan:

Standart Operating Procedure Bagian Kesekretariatan dan PDE Sekretariat Daerah Provinsi NTB Mengenai *Penerbitan Media Website dan Pembuatan Berita dalam Media Website* Sekretariat Daerah Provinsi NTB.

Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Mengenai *Keterbukaan Informasi Publik*.

Undang-Undang No.32 Tahun 2002 Mengenai *Lembaga Penyiaran Publik*.

Pergub NTB No.20 Tahun 2008, Mengenai *Program e-government (sms center, website, dan e-procurement)*

Laporan *E-Government* Tahun 2013, Bagian Kesekretariatan dan PDE Sekretariat Daerah Provinsi NTB.

Website:

[Http://lombokita.com/](http://lombokita.com/)

[Http://ntbprov.go.id/](http://ntbprov.go.id/)

[Http://ppidntbprov.go.id/](http://ppidntbprov.go.id/)

[Http://lpse.ntbprov.go.id/](http://lpse.ntbprov.go.id/)